

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran tuhan (Wahyu) yang menyatu dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final serta sempurna hingga akhir zaman.<sup>1</sup> Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan Amal yang dibangun diatas prinsip ibadah hanya kepada Allah Swt, bahkan ajaran tentang tauhid (prinsip keesaan tuhan) merupakan system kehidupan (*manhaj al-hayat*) bagi setiap muslim kapan dan dimana pun. Pendek kata Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipecah-pecah, *al-Islam kullu la yatajaza*.<sup>2</sup>

Namun kenyataan hidup para pemeluknya menunjukkan ekspresi dan aktualisi yang beragam, sehingga muncul fenomena “Islam” (*Nakirah*) versus “Al-Islam” (*Ma’rifat*), yang menggambarkan realitas kemajemukan Islam. Bagi kaum muslim memang hanya ada satu Islam yang diwahyukan dan dimandatkan tuhan, tetapi terdapat banyak penafsiran tentang Islam. Karena itu tidak mengherankan jika dalam kenyataan tumbuh beragam kepercayaan, praktik-praktik, masalah-masalah, perkembangan-perkembangan, dan gerakan-gerakan

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Surat Al-Maidah (5) : Dalam bagian ayat ke 3 Surat Al-Maidah itu, Allah berfirman : *alyaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum nikmaty wa radlitu lakum islama dina* (pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-Ridlai Islam itu jadi agama bagimu).

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi* Bandung: Mizan, 1993, hlm. 276.

yang menyediakan sejumlah penilaian tentang agama yang mengilhami dan mencerahi kehidupan sebagian besar di dunia ini.<sup>3</sup>

Salah satu fenomena baru dari keragaman Islam yang kini muncul secara relatif meluas di Indonesia ialah gerakan yang memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara formal dalam kehidupan negara atau pemerintah, yang berbeda dari arus besar Islam yang tidak formalistik sebagaimana ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama selama ini. Gerakan Islam tersebut secara khusus disebut dengan istilah "Gerakan Islam Syari'at", yakni suatu gerakan yang berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam institusi negara (pemerintahan).<sup>4</sup>

Selain fenomena di atas, dari sejak tahun 1980-an sampai setelah reformasi, kebangkitan Islam ini juga ditandai oleh munculnya aktor gerakan Islam baru. Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Gerakan mereka berada diluar kerangka *mainstream* proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut "Gerakan Islam Baru" (*new Islamic movement*). Kelompok-kelompok tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ) dan sebagainya, merupakan representasi baru gerakan Islam di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Organisasi Baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan *puritan*, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang memiliki *platform* yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan “Negara Islam” (*dawlah Islamiyah*) dan mewujudkan penerapan syari’at Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.<sup>5</sup>

Meskipun spectrum berbagai gerakan ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara ideologis, kelompok ini secara keseluruhan menganut paham “*Salafisme radikal*”, yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (Generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Bagi mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (*Bid’ah*) yang dipandang mengotori Islam. Radikalisme religio-historis ini diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat al-qur’an dan hadits secara harfiyah.<sup>6</sup>

Meskipun dalam latar belakang sosial politik yang berbeda dengan masa dulu dengan sekarang, *gerakan Islam baru* ini menyamakan gagasan mereka tentang penerapan syari’at Islam. Misalnya Hizbut Tahrir berupaya menawarkan agar sistem khilafah yang pernah diterapkan pada masa nabi dan *khulafa’ al-rosyidin* dihidupkan dan diterapkan kembali. Organisasi Hizbut Tahrir

---

<sup>5</sup> Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hlm. 14.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. xi.

berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaan yang tunggal, yaitu pemerintah yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Dalam pandangan yang sama Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah Islami.<sup>7</sup>

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak Islam sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekedar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.<sup>8</sup> Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada deskripsi diatas, maka masalah yang akan penulis jawab dalam skripsi ini berkisar tentang :

---

<sup>7</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 67-69.

<sup>8</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 8-9.

1. Bagaimana Gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dan Upaya apa yang dilakukan HTI dalam Sistem pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya?
2. Bagaimana relevansi gerakan HTI dalam kancah Perpolitikan sekarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat Pokok permasalahan diatas tujuan penulisan sekripsinya diarahkan kepada :

1. Untuk mengetahui konsep dan teori gerakan politik HTI sebagai gerakan politik Islam Ekstraparlementer dan cara-cara yang mereka tempuh untuk mewujudkan cita-citanya.
2. Mengetahui relevansi dengan keberadaan HTI dalam Sistem pemerintahan di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Studi yang pernah dilakukan tentang Hizbut Tahrir Indonesia sebetulnya sudah banyak yang mengkajinya, serta bisa dikategorikan dalam beberapa aspek umum (kapita selekta), aspek pendidikan, aspek pembaruan, aspek pemikiran dan aspek politik. namun dari beberapa tulisan yang telah penulis temukan baik dalam bentuk buku, karya ilmiah maupun buletin tidak

menyentuh pada kerangka gerakan politik, yang merupakan cikal bakal munculnya suatu cita-cita politik, akan tetapi tinjauan penulis dari beberapa tulisan tersebut cukup membantu untuk dijadikan sebagai acuan atau referensi yang tentunya memusatkan perhatiannya pada Pandangan, Konsep dan gerakan serta perilaku politik HTI yang merupakan bagian terpenting dalam politik Islam. Berikut diantara tulisan atau hasil penelitian yang penulis jadikan tolak ukur dalam pembahasan.

Ahmad Naezi dalam bukunya *Agama Politik, Nalar Politik Islam*. Ahmad Naezi dalam buku ini memaparkan tentang ruang lingkup pemikiran politik Islam serta menjelaskan pentingnya sistem pemerintahan pada negara muslim dan urgensi pemimpin dalam menjalankan sistem pemerintahan. beliau juga memaparkan bahwa pengaruh agama pada politik bukanlah sebuah fenomena yang hanya terjadi di dunia Islam. Tetapi adalah tidak mungkin bagi seorang ahli teori politik akan mengabaikan peran Islam dalam kehidupan publik umat muslim. Kaitanya dengan hukum pemerintahan, ahmad Naezi menyatakan bahwa setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksinya. Oleh karena itu hukum Islam (Syari'ah) juga membutuhkan sebuah negara untuk menegakkan sanksinya. Dan kaitanya dengan aspek kebudayaan ahmad Naezi dikatakan bahwa Islam sesuatu yang vital dalam aspek kebudayaan muslim, dan bahwa syari'ah membutuhkan kekuasaan politik dan otoritas agar bisa di implementasikan, sehingga akan mengantar kita pada sebuah kesimpulan

bahwa semua sistem politik dalam dunia Islam secara historis merupakan pemerintah religius.<sup>9</sup>

Abdul Ghaffar Aziz dalam bukunya *Islam dan Politik, pro dan kontra*, menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang beragam justru ada pada masa *Khulafa' al-rosyidin*. Keragaman itu seharusnya dijadikan sebagai rujukan metode pemerintahan Islam yang mengalami masa kejayaan dalam sejarah kepemimpinan Islam. Meskipun corak pemerintahannya beragam namun bentuk pemerintahannya tetap sama, yaitu dengan menjadikan Islam (al'Qur'an dan al-Hadits) sebagai rujukan dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Abdul karim, dkk dalam bukunya *Wacana politik Islam Kontemporer*, dalam bukunya menyatakan bahwa ide negara Islam muncul dengan tujuan agar supaya agama Islam dapat tegak di bumi dengan melalui gerakan politik sehingga akan membawa kesejahteraan dari segenap warga negara dengan dasar atau pedoman wahyu Allah dengan model pemerintahan yang pernah dibangun oleh nabi Muhammad setelah di Madinah, menurut Abdul karim secara umum, ada dua kekuatan yang menjadi sumber pokok dari sosial kontrol, yaitu agama dan politik, maka dari itu agama dan politik dalam implementasinya harus seirama.<sup>11</sup>

*Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* oleh Abdul Muin Salim, didalamnya diterangkan bahwa tuhan memberikan kewenangan kepada manusia

---

<sup>9</sup> Ahmed Naezi, *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006, hlm. 1-17.

<sup>10</sup> Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik, Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 34-38.

<sup>11</sup> Abdul Karim, dkk, *Wacana politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007, hlm. 1-5.

untuk mengaktualisasikan kodrat manusia sebagai hamba Allah, serta diberikan kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain juga mewajibkan pemerintah agar menegakan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan untuk itu Allah pun memberikan kekuasaan politik kepada mereka. Kewenangan yang diberikan Allah kepada pemerintah melalui al-Qur'an tidak hanya terbatas pada penerapan pada hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan membuat aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur syari'ah secara tegas dan rinci. Dalam buku ini juga secara umum dijelaskan cita-cita politik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh dalam al-Qur'an adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik (2) berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap (3) terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Cita-cita politik tersebut ini tersimpul dalam ungkapan *Baladatun Thoyyibatun wa robbun ghofur*, yang mengandung konsep "Negeri sejahtera dan sentosa".<sup>12</sup>

Dalam buku *Politik kebangkitan Islam, keragaman dan Kesatuan* oleh Shireen T. Hunter juga menerangkan tentang faktor-faktor munculnya gerakan *revivalisme*, atau gerakan pembaruan yang lama sekali dirindukan oleh sebagian aktivis muslim. Gerakan revivalisme ini muncul salah satunya adalah kegagalan pemerintah sekuler di banyak negara Islam belakangan ini untuk mengakui pentingnya tempat Islam dalam struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.

---

<sup>12</sup> Abdul Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 290-291.

Disisi lain kekecewaan umat Islam dengan akibat-akibat modernisasi dan pembangunan yang dilhami oleh model-model dan ideologi asing, kerusuhan-kerusuhan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh proses ini, dan sikap yang tidak berimbang, dimana keuntungan telah dibagikan, dan di lain pihak gerakan-gerakan itu juga diakibatkan karena keberhasilan beberapa aspek dari proses pembangunan dan modernisasi di negara-negara Islam.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan pembahasan tentang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, penulis menemukan satu karya yang membedah tentang Hizbut Tahrir yaitu *Analisis terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir* yang ditulis Dedy Slamet Riyadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2002 dalam bentuk Skripsi. Skripsi ini menggambarkan tentang gagasan pentingnya khilafah dan bentuk sistem kekhilafahan, dalam gagasannya HTI khilafah merupakan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, sehingga Sistem kholifah sangat berbeda dengan sistem lainnya yang telah populer saat ini, misalnya bentuk pemerintahan *monarchi*, republik, kekaisaran atau federasi.<sup>14</sup>

Pada pembahasan yang sama penulis juga menemukan satu karya yang membedah tentang Hizbut Tahrir yaitu *Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah* yang ditulis Miftahul Ilmi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2003 dalam bentuk Skripsi. Dalam Skripsi

---

<sup>13</sup> Shireen T. Hunter, *Politik kebangkitan Islam, keragaman dan Kesatuan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001, hlm. 304-305.

<sup>14</sup> Dedy Slamet Riyadi, *Analisis terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hlm. 39-42.

tersebut dijelaskan bahwa gagasan Hizbut Tahrir Indonesia tentang khilafah Islmiah merupakan satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem pemerintahan dan penerapan hukum Islam secara total di tengah-tengah masyarakat, dimana sistem khalifah ini merupakan bentuk negara/pemerintahan universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama (*al-din wa al-daulah*), namun gagasan tersebut dalam perspektif Nahdlotul Ulama (NU) sangat tidak mungkin diterapkan, dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara pancasila yang dihuni oleh berbagai macam ragam budaya. Indonesia juga bukan negara yang berideologi Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan deskripsi diatas, menurut hemat penulis hanya memaparkan pokok-pokok pikiran politik kenegaraan versi Islam serta latar belakang urgensitas penyelenggaraan negara oleh sistem atau pelaku sistem yakni kepala negara dan semua aparatnya, namun tidak menyentuh pada gerakan ataupun perilaku politik. Menurut penulis padahal kekuatan dan stagnan atau tidaknya sebuah misi politik ditentukan oleh ekspresi dan “warna” gerakan politik melalui saluran-saluran ijtihad atau perilaku yang komprehensif, sehingga penulis mencoba meneliti sebuah gerakan revivalisme Islam melalui organisasi Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan salah satu dari beberapa Organisasi Islam di Indonesia yang saat ini gencar mewacanakan dihidupkannya kembali pemerintahan Islam yang dalam gerakannya diluar sistem politik yang

---

<sup>15</sup> Miftahul Ilmi, *Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hlm. 4-54.

berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini seiring multi gerakan Islam di Indonesia dengan semakin gencarnya gerakan yang mengarah pada penawaran sistem kenegaraan versi Islam maupun gerakan yang menentangnya.

## E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode :

### 1. Jenis, Sifat dan pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*),<sup>16</sup> karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk tulisan lain. Sifat penelitian ini adalah bersifat eksploratif yaitu penelitian untuk penjelajahan terhadap suatu konsep, pemikiran atau fenomena.<sup>17</sup> Maka dari itu salah satu pendekatan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas yang terkandung dalam ajaran agama yang esensial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologis Riset Sosial* Bandung: Mundur Maju, 1990, hlm. 33.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 19.

<sup>18</sup> Peter Conolly, *Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LkiS, 2002, Cet I, hlm. 153.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup>

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut Konsep gerakan politik HTI, yang terdiri dari kerangka dasar gerakan politik, aktifitas politik, kontribusi untuk negara dan segala sesuatu yang menyangkut obyek diatas.

Karena banyaknya sumber data yang diperoleh, Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer merupakan sumber utama, yaitu buku yang membahas secara langsung tentang garis perjuangan politik Hizbut Tahrir seperti buku *Konsepsi Kepolitikan Hizbut Tahrir*, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, *Pembentukan Partai Politik Islam*, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, yang diterbitkan Hizbut Tahrir baik dalam bentuk cetak maupun CD. Sedangkan sumber sekunder lainnya berupa buku-buku atau tulisan lain yang terdekat dengan sumber primer diatas, misalnya *Gerakan Islam Syari'at* karangan Haedar Nashir, *Arus Baru Islam Radikal* karangan M. Imdadun Rahmat, *Islam, Demokratisasi dan pemberdayaan civil society* karangan Muhammad A.S. Hikam, ataupun buku dan tulisan lain yang terkait dengan topik yang penulis bahas.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, tt, hlm 114.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu :

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data melalui bahan tertulis, artifack, film, dan lain sebagainya. Yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa atau pemikiran.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil, aktifitas dan aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir.

#### b. Interview (Wawancara)

Metode *Interview* wawancara adalah Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan dalam rangka upaya memperoleh informasi atau data yang diperlukan dengan bertanya langsung kepada responden tentang pemikiran dan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia sekaligus menginformasi data yang penulis peroleh dari sumber tertulis. Wawancara penulis lakukan dengan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia maupun orang yang pernah berkecimpung langsung dengan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menggali informasi tambahan tentang pemikiran dan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2001, hlm. 61.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 135.

c. *Library Research* (Kepustakaan)

*Library Research* adalah metode penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis tentang suatu pemikiran atau fenomena.<sup>22</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menggali pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia yang terdapat dalam buku primer maupun sekunder.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari data primer maupun sekunder, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, fenomenologis, content analysis dan komparatif.

a. Deskriptif analisis

Deskriptif analitis yaitu penyajian data guna menjelaskan suatu pemikiran atau fakta apa adanya.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk menyajikan data konsep perpolitikan dalam Islam secara umum yang dielaborasi dalam bab II, juga menyajikan aktifitas HTI dalam kontribusi kepada bangsa Indonesia yang penulis tuangkan dalam bab III.

b. Fenomenologis

Fenomenologis adalah suatu penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995, hlm. 5.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke 12, 1998, hlm. 18.

tertentu,<sup>24</sup> atau dengan kata lain memaparkan data-data serta menguraikannya secara teratur, sehingga didapat pemahaman data yang valid dan tidak lepas dari sumber data.<sup>25</sup> Dengan metode ini penulis berupaya mendeskripsikan fakta-fakta itu dan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya.<sup>26</sup> Sehingga untuk memahami sebuah fenomena Konsep pergerakan yang ditawarkan lebih mudah.

c. Content analisis

Content analisis adalah metode untuk menganalisis keseluruhan makna yang terkandung dalam data.<sup>27</sup> Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pikiran Hizbut Tahrir Indonesia tentang perpolitikan, pandangannya terhadap ideologi ataupun sistem politik yang selama ini diterapkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya menilai data terkait, mengidentifikasi dan memadukan konsep-konsep yang digunakannya yang penulis tuangkan dalam bab IV.

d. Komparasi

Komparasi adalah suatu upaya pemaknaan dengan langkah membandingkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain.<sup>28</sup> Langkah ini merupakan suatu upaya guna mengetahui relevan dan tidaknya suatu upaya atau setrategi dan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>26</sup> Hadati Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63.

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm 207.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu tentang gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam ekstraparlementer di Indonesia pasca Reformasi.

Bab pertama bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang konsep gerakan politik Islam di Indonesia. Bab ini memuat sosio politik Islam di Indonesia pra reformasi dan pasca reformasi, kerangka dasar gerakan politik Islam di Indonesia, konsep dan teori kepolitikan organisasi Islam di Indonesia.

Bab Ketiga akan memaparkan Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam ekstraparlementer, bab ini memuat Profil Hizbut Tahrir Indonesia dan perkembangannya di Indonesia, Aktifitas politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam Ekstraparlementer, aksi-aksi Hizbut Tahrir Indonesia dalam kontribusi sistem pemerintahan di Indonesia.

Bab Keempat merupakan analisis. Point-point yang akan dianalisis adalah analisis terhadap gerakan politik HTI sebagai organisasi Islam Ekstraparlementer di Indonesia, gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam Ekstraparlementer dalam sistem demokrasi di Indonesia, Relevansi dan prospek gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sosio Politik di Indonesia, dan format baru politik Islam di Indonesia.

Bab Kelima penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.